

ABSTRAK

Masalah pertanahan merupakan suatu masalah strategis yang berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya maupun politik yang harus segera ditangani supaya tidak menimbulkan banyak benturan kepentingan sehingga timbul berbagai macam permasalahan dibidang pertanahan. Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yakni dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah dan sertipikat juga berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi permasalahan sengketa pertanahan seperti penerbitan sertipikat ganda hak atas tanah, hal ini mengakibatkan adanya kepemilikan ganda sertipikat hak atas tanah. Oleh karena itu pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan perkaranya di pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah apabila terdapat penerbitan sertipikat ganda di Kota Semarang serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa sertipikat ganda dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt/2011.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah berdasarkan dengan adanya sertipikat tanah sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya kepalsuan sertipikat tersebut maka sertipikat adalah sah dan dapat menjadi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa sertipikat ganda dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/Pdt/2011 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Sertipikat Ganda, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The problem of land is a strategic problem that is related to economic, social, cultural and political factors which must be addressed immediately so as not to cause many conflicts of interest so that various kinds of problems arise in the field of land. Land registration in Indonesia aims to ensure legal certainty over registered parcels, namely by providing certificates as proof of land ownership and certificates also apply as a strong proof. However, in reality there are still many land dispute issues such as the issuance of multiple certificates of land rights, this results in the dual ownership of certificates of land rights. Therefore, those who feel that their interests are disadvantaged will file their case in court. The purpose of this study is to determine the legal protection for holders of land rights if there is a double certificate issuance in the City of Semarang and how judges considerations in deciding on a double certificate dispute in the Supreme Court's decision No. 189 K / Pdt / 2011.

This research was conducted using a normative juridical approach with descriptive analytical typology, using secondary data.

The results of this study are legal protection for holders of land rights based on the presence of certificates of land as long as it cannot be proved the falsity of the certificates, the certificates are legal and can be a guarantee of certainty and legal protection for holders of land rights. Judge's legal considerations in deciding upon a double certificate dispute in the Supreme Court Decision Number 189K / Pdt / 2011 are in accordance with the laws and regulations and the applicable provisions.

Keywords: Double Certificate, Legal Protection, Judge Judgment